

TRANSFORMASI SOSIAL DAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT RESPONSIF GENDER

Retno Ayu Puspita S
retnoayupuspitaa@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Mamuju

ABSTRAK

Transformasi sosial merupakan suatu proses yang terus bergerak dalam kehidupan sosial baik secara individu ataupun komunitas sosial. Dalam proses tersebut transformasi sosial ini berkaitan erat dengan bagaimana manusia dapat berbagai nilai dalam kehidupannya yang mengalami perubahan perspektif termasuk dalam konteks ini adalah penguatan ekonomi masyarakat responsif gender. Dalam proses tersebut, komunitas sosial tertentu seperti perempuan yang selama ini banyak terpasung dalam budaya patriarki yang tidak menguntungkan mereka dalam hal akses untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi telah mengalami pergeseran pespektif dalam lokus transformasi sosial sebagai komunitas yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Kata Kunci: Transformasi Sosial, Penguatan Ekonomi Masyarakat Responsif Gender.

ABSTRACT

Social transformation is a process that continues to move in social life both individually and in social communities. In this process, this social transformation is closely related to how humans can have various values in their lives that experience a change in perspective, including in this context is the economic strengthening of gender-responsive communities. In the process, certain social communities such as women, who have been shackled in patriarchal cultures that do not benefit them in terms of access to economic welfare, have experienced a perspective shift in the locus of social transformation as communities that have the same rights as men.

Keywords: Social Transformation, The Economic Strengthening of Gender-Responsive Communities.

PENDAHULUAN

Transformasi sosial merupakan suatu fitrah kehidupan sosial yang meniscayakan bahwa segala sesuatu akan bertransformasi dalam lokus ruang dan waktu. Dalam kaitannya dengan penguatan ekonomi masyarakat, ada sebuah proses dialektika sosial yang sangat kompleks di dalamnya dimana nilai-nilai yang dipegang oleh suatu komunitas sosial tertentu akan mengalami transformasi ke wujud nilai yang berbeda dalam menyikapi penguatan ekonomi masyarakat responsif gender yang dilakukan. Hal ini dikemukakan Mansour Fakih bahwa adanya pandangan yang bersifat subordinasi pada suatu komunitas, umumnya terhadap perempuan, sangat berpotensi dalam mendudukkan komunitas tersebut pada situasi yang tidak menguntungkan dan tidak responsif gender. Seiring dengan perjalanan waktu maka semua nilai tersebut akan berhadapan dengan berbagai tuntutan zaman sehingga transformasi sosial yang menghendaki perubahan menjadi suatu keniscayaan.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa transformasi nilai merupakan suatu sunatullah yang harus dipahami dan diterima dalam lintas ruang dan waktu. Adanya fakta historis-empiris terkait ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan yang dilandasi oleh pemahaman yang pada awalnya sangat tidak responsif gender harus diubah dengan pemahaman yang mendudukkan mereka sebagai komunitas sosial yang juga memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh hak-hak sosialnya. Dalam konteks ini, kehadiran negara dengan otoritas yuridis-normatifnya harus hadir dalam menjembatani

kepentingan masing-masing pihak. Hal ini sejalan dengan teori kekuasaan yang dikemukakan Michel Foucault bahwa kekuasaan tidak bisa dipahami sebagai suatu hegemoni dari satu komunitas atas komunitas lainnya tapi justru sebaliknya kekuasaan harus dipahami sebagai suatu wadah untuk menjalankan distribusi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ada dalam struktur kekuasaan tersebut untuk selanjutnya mengarah pada tercapainya kemaslahatan yang diharapkan bersama.

Dalam tradisi Barat, gerakan-gerakan sosial yang mengarah pada upaya penguatan kesetaraan gender digambarkan Cathia Jenainati dan Judy Groves yang menegaskan bahwa gerakan feminisme yang berkembang dalam tradisi Barat pada awalnya banyak mengarah pada suatu kritik terhadap menguatnya budaya patriarkhi yang menempatkan kaum perempuan berada di bawah kontrol kaum laki-laki dengan beberapa alasan yang cenderung bersifat parsial. Beberapa alasan yang mendukung menguatnya budaya patriarkhi tersebut adalah kaum perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah, cepat emosional, serta tidak bisa berpikir rasional. Berbagai pandangan yang berbasis stereotip tersebut tentu saja berimplikasi destruktif bagi perempuan sehingga mereka sangat terbatas atas akses hak-hak sosialnya yang pada gilirannya membuat mereka tertinggal dari laki-laki dalam berbagai aspek termasuk dalam hal ekonomi. Penguatan ekonomi masyarakat responsif gender dan transformasi sosial yang dikaji dalam makalah ini mencoba untuk memberikan suatu perspektif alternatif dalam memahami bagaimana perempuan sebagai komunitas sosial yang banyak terpasung dalam himpitan kepentingan budaya patriarki yang tidak adil gender dapat mendapatkan penguatan ekonomi sebagai bagian dari masyarakat seiring dengan adanya transformasi sosial yang terus mengalami pergerakan masif dan dinamis dalam lokus ruang dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Sosial: Sebuah Barometer Akuntabilitas Penguatan Ekonomi Masyarakat

Transformasi sosial dapat dipahami sebagai sebuah proses perubahan sosial yang terus terjadi dalam kehidupan manusia seiring dengan adanya pergeseran pola pikir mereka dalam menyikapi berbagai fenomena yang ada seperti pada pergeseran masyarakat agraris ke masyarakat industri. Masyarakat agraris biasanya didasarkan pada pertanian dan produksi barang secara tradisional. Namun, dengan munculnya revolusi industri, terjadi pergeseran menuju ekonomi yang didominasi oleh produksi industri, perdagangan, dan layanan. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam pola kerja, sumber daya yang digunakan, serta distribusi kekayaan. Transformasi ini juga mempengaruhi budaya, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik sosial. Nilai-nilai seperti efisiensi, rasionalitas, dan kemajuan mulai mendominasi dalam masyarakat industri. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa transformasi sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dapat dipahami sebagai sebuah proses kompleks yang melibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ini melibatkan pergeseran besar dalam berbagai dinamika kehidupan manusia yang memengaruhi cara manusia hidup, berpikir, dan berinteraksi satu sama lain, termasuk dalam hal ini adalah relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam berbagai upaya penguatan ekonomi keluarga yang bersifat domestik ataupun penguatan ekonomi masyarakat yang bersifat publik mulai terbuka dalam bingkai inklusivitas pandangan sosial masyarakat.

Dalam kerangka historisnya, tradisi Barat juga sangat menekankan kesetaraan gender sebagai basis penguatan ekonomi masyarakat responsif gender yang salah satunya dapat ditemukan dalam gerakan feminisme yang banyak dilakukan oleh para pegiat gender di dunia Barat. Ruddick, Noddings, dan Gilligan dalam Nugroho dkk. mengemukakan

keberadaan kaum perempuan sebagai makhluk yang memiliki kekhasan dalam kehidupannya dapat dibaca dalam perspektif etika feminisme yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan pada beberapa aspek yang dalam hal ini adalah:

a. Maternal thinking

Menurut Ruddick, maternal thinking bukanlah berhubungan dengan eksistensi seseorang untuk menjadi ibu, namun lebih kepada cara berpikir. Artinya ini bisa dimiliki bukan hanya laki-laki saja, namun juga oleh perempuan. Sehingga perempuan tentu saja memiliki peran dalam berbagai isu dan masalah tanpa menggunakan kekerasan. Mengapa tanpa kekerasan? Karena manusia pada dasarnya memiliki sifat kelemahlembutan. Kemampuan bertindak tanpa kekerasan sesungguhnya merupakan pengalaman maternal, yang secara khusus hanya dimiliki oleh ibu, sehingga ibu sesungguhnya dapat menjadi sumber bagi adanya politik perdamaian. Jadi pengalaman maternal bukan hanya berhubungan dengan masalah anak-anak, namun juga tentang dunia. Bagi Ruddick, cara berpikir maternal sesungguhnya menawarkan cara untuk membangun politik perdamaian. Karena nilai-nilai yang dikembangkannya seperti perhatian dan cinta kasih dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nasional bahkan internasional, terutama perang, terorisme, dan aksi fundamentalisme.

b. Caring

Pemikir etika feminisme adalah Noddings. Ia memperkenalkan etika feminisme kepedulian (caring). Dia memulai pemikirannya dengan cara membandingkan antara etika dan prinsip rasional seperti prinsip perbandingan, proposisi, justifikasi, dan keadilan. Pendekatan rasional tersebut dianggap sebagai peran ayah. Sehingga akan berdampak pada anggapan yang muncul adalah sebagai pemberani, kuat, dan gagah. Sehingga anak pun cenderung mengambil jarak dengan ayah. Pendekatan ini mengarah kepada kedisiplinan, bahkan pada bisa mengarah pada kekerasan atas nama prinsip moral. Noddings menawarkan sebuah pendekatan yang berbeda berakar dari sifat penerimaan (receptive), keterhubungan (relatedness), dan tanggung jawab (responsiveness). Prinsip tersebut berhubungan dengan prinsip ibu dengan kedekatan dan penerimaan sepenuhnya terhadap anak. Kepedulian menurut Noddings bisa diasosiasikan dengan aspek feminim.

c. Ethic of care

Ethic of care adalah pemikiran yang ditawarkan oleh Gilligan. Menurutnya, tolak ukur perkembangan moral laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda. Perbedaan tersebut antara lain; landasan moralitas perempuan didasarkan pada prinsip penyatuan yaitu keberadaan relasi dengan orang lain. Tidak terlepas pengalaman sebagai ibu. Laki-laki menekankan prinsip pemisahan yang artinya laki-laki akan berusaha menjaga jarak dengan lingkungannya. Ini bentuk untuk eksistensi laki-laki. Laki-laki lebih otonom, menekankan kebebasan, dan kemerdekaan. Laki-laki lebih menekankan keadilan, memperlakukan orang lain secara objektif dan terbuka. Sedangkan perempuan lebih menekankan pada kepedulian dan perempuan akan lebih bersifat peduli terhadap penderitaan orang lain.

Keberadaan transformasi sosial sebagai sebuah barometer akuntabilitas penguatan ekonomi masyarakat responsif gender meniscayakan bahwa perbedaan lokus ruang dan waktu dalam kehidupan sosial manusia sangat memungkinkan bagaimana penguatan ekonomi masyarakat responsif gender yang dilakukan dapat berbeda satu sama lain seiring dengan perbedaan konteks penerapannya. Perbedaan kultur sosial berimplikasi pada penilaian akuntabilitas penguatan ekonomi masyarakat responsif gender. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Rizal Darwis, bahwa perbedaan perspektif dalam menilai suatu obyek dapat ditentukan oleh beberapa aspek yaitu

Dalam menjabarkan berbagai implikasi praktis dari berbagai perubahan hukum Islam dalam pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan mengacu pada berbagai faktor tersebut, Rizal Darwis menggambarkan bahwa faktor-faktor tersebut terdiri atas, a) situasi zaman (al-azminah), b) situasi tempat (al-amkinah), c) kondisi (al-ahwal), d) motivasi (al-niyah), serta e) adat-tradisi (al-awaid).

2. Penguatan Ekonomi Masyarakat Responsif Gender dan Dialektika Kepentingan Manusia Tanpa Sekat Gender

Penguatan ekonomi masyarakat responsif gender merupakan suatu paradigma yang dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern yang meniscayakan adanya suatu relasi gender yang adil untuk semua pihak. Menyikapi hal tersebut, Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa pemberian akses terhadap semua pihak dalam hal ekonomi merupakan suatu hak yang imanen dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang mulia lagi dimuliakan. Keaktifan mereka dalam berbagai jenis profesi dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengejawantahan nilai-nilai Islam yang memahami konsep relasi gender bukan hanya sebatas mengatur keadilan gender dalam masyarakat tapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Apa yang dikemukakan Nasaruddin Umar tersebut menunjukkan bagaimana kehadiran suatu pijakan teologis normatif dalam memahami bagaimana dialektika kepentingan manusia tanpa sekat gender dalam mengakses berbagai penguatan sumber daya termasuk dalam hal ini adalah ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

Kehadiran negara dalam memberikan berbagai kerangka yuridis normatif dalam hal akses yang sama bagi semua warga negara dalam memperoleh kesejahteraan sosial dalam hal ekonomi tidak bisa dilepaskan dari fungsi negara itu sendiri yang oleh Ahmad al-Husairy digambarkan pada beberapa fungsi sebagai berikut, a) memelihara agama serta menjaga kehidupan beragama dari berbagai faktor yang dapat mencederainya, b) berkewajiban memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara termasuk umat Islam dalam menyebarkan kebaikan dengan berbagai cara yang rasional dan damai, c) menegakkan hukum yang terbangun atas nilai-nilai keadilan, kesetaraan, egalitarian, dan yang lainnya kepada semua warga negara, d) menjaga stabilitas dan keamanan negara sehingga semua warga negara merasakan kedamaian dalam kehidupan sosialnya, e) membentuk masyarakat yang rukun, damai, serta saling tolong menolong dalam kebaikan dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar.

Relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, dalam kerangka historisnya, terus menunjukkan dialektika kepentingan yang pada masa-masa awal banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki. Dalam proses tersebut, kepentingan perempuan menjadi kurang terakomodir seperti yang dapat ditemukan dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah dimana kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib bagi keluarga. Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam tradisi kehidupan masyarakat Barat pada masa-masa awal yang memahami keberadaan perempuan sebagai pemantik munculnya dosa manusia. Dalam menggambarkan bagaimana pembatasan akses perempuan terkait pemerolehan kesejahteraan sosial termasuk dalam bidang ekonomi, Sheikh Nefzawi, sebagaimana dikutip Mansour Fakih, mengemukakan bahwa tipe perempuan ideal dapat ditemukan pada karakteristik yang diberikannya sebagai berikut:

Perempuan yang jarang bicara atau ketawa. Dia tidak pernah meninggalkan rumah. Walaupun untuk menjenguk tetangganya atau sahabatnya. Dia tidak memiliki teman perempuan. Dan tidak percaya pada siapa saja kecuali pada suaminya. Dia tidak menerima apapun dari orang lain kecuali dari suami dan orang tuanya. Jika dia bertemu dengan sanak keluarganya, dia tidak mencampuri urusan mereka. Dia harus membantu segala

urusan suaminya. Tidak boleh banyak menuntut atau bersedih. Dia tidak boleh tertawa selagi suaminya bersedih dan senantiasa menghiburnya. Dia menyerahkan diri hanya kepada suaminya meskipun jika kontrol akan membunuhnya. Perempuan seperti itu adalah yang dihormati oleh semua orang.

Apa yang dikemukakan Sheikh Nefzawi, sebagaimana dikutip Mansour Fakih, menunjukkan adanya suatu proses dialektika kepentingan yang mengarah untuk menguatkan relasi gender pada satu sisi serta adanya suatu proses dialektika kepentingan yang mengarah tetap mempertahankan status quo budaya patriarki yang menguntungkan pihak laki-laki.

3. Relevansi Transformasi Sosial dengan Penguatan Ekonomi Masyarakat Responsif Gender

Relevansi transformasi sosial dengan penguatan ekonomi umat responsif gender merupakan suatu keniscayaan mengingat teori-teori sosial yang sejalan dengan ide-ide sosial konstruktif memiliki perhatian yang sangat besar dalam menghadirkan berbagai nilai universal yang sejalan dengan penguatan ekonomi masyarakat responsif gender tersebut seperti kemanusiaan, keadilan, egalitarian, cinta, kasih sayang, dan yang lainnya. Transformasi sosial dengan pergeseran paradigma berpikir yang sangat responsif terhadap berbagai fenomena dalam kehidupan sosial manusia meniscayakan kehadiran semua pihak dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat responsif gender. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan yuridis normatif dalam konteks ke-Indonesiaan menunjukkan bagaimana komitmen yang besar dari negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia. Hal yang sama dengan Pancasila sebagai dasar negara menjadi semacam paradigma mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut. Negara dengan segala fungsi mendasarnya tersebut diharapkan akan mampu menegosiasikan berbagai kepentingan-kepentingan semua individu, kelompok, ataupun golongan secara proporsional, komprehensif, dan holistik.

Konsep kesetaraan gender yang melandasi gagasan penguatan ekonomi masyarakat responsif gender, pada dasarnya, tidak bisa dipisahkan dari seperangkat paradigma yang mewarnai pemahaman gender hermeneutika feminis yang dalam hal ini adalah:

- a. Semua kritik feminis menempatkan kepentingan ekstrim terhadap kesadaran feminis, termasuk di dalamnya pengalaman unik sebagai suatu cara memahami berbagai teks suci yang sarat dengan isyarat teologis normatif tentang relasi laki-laki dan perempuan. Kesadaran mendalam adalah tentang kesamaan dan keseimbangan, serta tuntutan memperlakukan kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki.
- b. Semua kaum perempuan adalah manusia seutuhnya yang tentu dalam penciptaannya telah dilengkapi dengan seperangkat hak asasi yang perlu dihormati berikut seperangkat potensi yang harus dinegosiasikan dengan potensi kaum laki-laki sebagai mitranya.
- c. Kaum perempuan telah menemukan penafsiran tradisional mengenai identitas mereka yang bertentangan dengan kesadaran identitas mereka dan pengalaman sendiri, kriteria dasar untuk menghakimi perempuan adalah pengalaman perempuan itu sendiri.

Upaya untuk mendudukan perempuan dalam suatu siklus penguatan ekonomi masyarakat responsif gender memiliki persentuhan ontologis, epistemologis, ataupun aksiologis dengan terus bergeraknya transformasi sosial yang terus membuka akses pada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Ontologi mengacu pada pemahaman tentang realitas atau eksistensi. Dalam konteks ini, upaya untuk mendudukan perempuan dalam siklus penguatan ekonomi responsif gender menyangkut pemahaman tentang eksistensi perempuan sebagai individu yang memiliki potensi, hak-hak, dan kontribusi

unik dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Hal ini melibatkan pengakuan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan ekonomi dan memiliki peran yang setara dengan laki-laki. Epistemologi berkaitan dengan cara kita memperoleh pengetahuan dan memahami dunia. Dalam konteks ini, upaya penguatan ekonomi masyarakat yang responsif gender memerlukan pengakuan terhadap pengetahuan dan pengalaman unik perempuan dalam konteks ekonomi dan sosial. Ini termasuk pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam berbagai sektor ekonomi serta pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi. Aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari tindakan kita dan menentukan apa yang dianggap penting atau berharga dalam masyarakat. Dalam konteks ini, upaya untuk mendudukkan perempuan dalam siklus penguatan ekonomi responsif gender melibatkan penegasan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Ini melibatkan pengakuan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki nilai yang sama dalam masyarakat dan memiliki hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Dengan memperhatikan persentuhan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ini, manusia dapat mengembangkan pendekatan yang holistik dan terpadu dalam upaya mendukung kesetaraan gender dalam penguatan ekonomi masyarakat. Ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak, kemampuan, dan kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi, serta pengintegrasian nilai-nilai kesetaraan dan inklusi dalam semua aspek kebijakan, program, dan praktik ekonomi. Dengan demikian, transformasi sosial yang berkelanjutan menuju kesetaraan gender dapat diwujudkan melalui upaya bersama untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat yang responsif gender.

Dalam kerangka filosofisnya, distribusi ekonomi yang adil terhadap laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan dari keberadaan keduanya sebagai manusia yang selalu berupaya untuk bermetamorfosis dari homo deus menjadi human deus. Dalam menggambarkan bagaimana manusia dengan seperangkat tabiat yang imanen dalam keberadaannya, Ali Syariati menggambarkan sebagai berikut:

- a. Manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah makhluk yang memiliki substansi yang mandiri di antara makhluk-makhluk yang memiliki wujud fisik dan dalam dirinya terdapat kemuliaan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya.
- b. Manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas sehingga manusia harus mampu membuka cakrawala berpikirnya tanpa harus terpasung pada dogma-dogma yang membelenggu kebebasan berpikirnya. Dengan kata lain, manusia dengan kehendak bebasnya dapat bertransformasi dari pola pikir yang mitosentris ke logosentris.
- c. Manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah makhluk yang berpikir, bernalar, serta berakal sehingga mereka dapat menemukan hal-hal yang tersembunyi dari penangkapan indranya melalui akselerasi daya pikir, daya nalar, dan daya akal yang dimilikinya.
- d. Manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah makhluk yang sadar terhadap dirinya sehingga mereka memiliki peluang untuk mempelajari diri mereka sebagai obyek yang terpisah dari dirinya, menarik hubungan sebab akibat, menganalisis, serta mengubah diri mereka sendiri.
- e. Manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah makhluk kreatif sehingga sangat memungkinkan mereka menciptakan sesuatu yang bersifat inovatif dalam kehidupannya.
- f. Manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah makhluk yang visioner dan memiliki konsep yang ideal atas segala sesuatu.

- g. Manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah makhluk moral dan memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai.
- a. Penguatan ekonomi masyarakat responsif gender dan relevansinya dengan transformasi sosial akan terus mengalami perkembangan responsif dan pergerakan transformatif ke depannya seiring dengan semakin menguatnya upaya untuk mengarusutamakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam hal ekonomi.

KESIMPULAN

Penguatan ekonomi masyarakat responsif gender dalam lokus transformasi sosial memiliki urgensi yang besar dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Perempuan yang selama ini banyak menjadi bagian yang terpinggirkan dari ekonomi formal dan menghadapi hambatan-hambatan dalam mengakses sumber daya ekonomi, seperti tanah, modal, dan pendidikan dapat diberdayakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan serta memperkuat ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Penguatan ekonomi yang responsif gender dapat membantu mengurangi ketimpangan gender dalam akses terhadap kesempatan ekonomi dan kontrol atas sumber daya yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses terhadap pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan kepemilikan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, Rizal, Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 5 No.1 Tahun 2017
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- al-Husairy, Ahmad, *Al-Daulah Wasiyah al-Hukmi*, Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1988.
- Islami, Sayyaf Nasrul, *Hermeneutika Feminis terhadap Wacana Kesetaraan Gender: Sebuah Studi Literatur*, *Jurnal Hawa* Vol. 04 No. 02 Tahun 2022.
- Jenainati, Cathia dan Judy Groves, *Introducing Feminism*, Malta: Gutenberg Press, 2007.
- Kamahi, Umar, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*, *Jurnal al-Khitabah* Vol. III No. 01 Tahun 2017.
- Nugroho dkk., *Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat*, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan* Vol.22 No. 01 Tahun 2017.
- Septiarti, S. Wisni, *Transformasi Sosial Masyarakat dalam Perspektif Strukturalisme-Fungsionalisme: Suatu Tinjauan Sosiologis*, *Jurnal Cakrawala Pendidikan* No. 3 Tahun 1994.
- Syariati, Ali *Humanisme antara Islam dan Madzhab Barat*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1992.
- Umar, Nasaruddin, *Islam Fungsional: Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.